

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT NAGARI
PASCA BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 67 TAHUN 2017 DI KABUPATEN AGAM**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum

Fakultas Hukum Universitas Andalas



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT NAGARI
PASCA BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 67 TAHUN 2017 DI KABUPATEN AGAM**

**Febri Israndi, NIM 1720112061, Program Studi Magister Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2021, Pembimbing Dr. Yuslim,
SH, MH dan Dr. Khairani, SH, MH**

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberi peluang kembalinya sistem Pemerintahan Nagari sebagai sistem pemerintahan terendah. Ruang lingkup Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dana Pemberhentian Perangkat Desa adalah: Pengangkatan Perangkat Nagari dilakukan secara periodisasi . Pada Tahun 2016 Kabupaten Agam Mengeluarkan sebuah Peraturan Daerah Nomor 13 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari, untuk melihat mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari Setelah berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 maka Permasalahan yang dibahas adalah (1) Bagaimana Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari di Kabupaten Agam sebelum berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 ? (2) Bagaimana Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari setelah Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017. Penelitian ini Menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris*. Data yang dikumpulkan berupa data primer yang diperoleh dari pihak terkait dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari, serta data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Artinya penulis melihat kenyataan di lapangan tentang mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari pasca terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017. (1) Pada prinsipnya Sebelum berlakunya Permendagri Nomor 67 tahun 2017 Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari berpedoman kepada Permendagri Nomor 83 tahun 2015 dan Perda Kabupaten Agam Nomor 13 tahun 2016 dimana Pengangkatan dan Pemberhentian dilakukan secara Periodisasi (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari setelah berlakunya Permendagri Nomor 67 tahun 2017 tidak lagi dilakukan secara periodisasi tetapi ditetapkan berdasarkan usia, apabila masa tugas Perangkat Nagari habis maka diangkat kembali sampai dengan usia 60 tahun, akan tetapi masih juga ada Nagari yang tidak mempedomani Permendagri tersebut dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Nagari

Kata kunci: Pengangkatan, Pemberhentian, Perangkat Nagari, dan Permendagri

The Appointment and the Discharge of Village Apparatus after the Enforcement of the Minister of Home Affairs Regulation No. 67 of 2017 in Agam.

**Febri Israndi (1720112061), Magister of Law, Faculty of Law,
Andalas University, 2021, Advisors: (1) Dr. Yuslim, S.H,M.H (2) Dr.
Khairani, S.H,M.H.**

Abstract

The Law no. 23 of 2014 on the local government has given an opportunity to the comeback of the village government system as the lowest government system. The scope of the appointment and the discharge of village apparatus in article 12 of Minister of Home Affairs Regulation no. 67 of 2017 on the appointment and the discharge of village apparatus is the village apparatus is appointed periodically. In 2016, Agam regency released a local regulation no. 13 on the appointment and the discharge of village apparatus to see its mechanism after the enforcement of Minister of Home Affairs Regulation no. 67 of 2017. Therefore, the problems discussed are (1) How is the appointment and the discharge of village apparatus in Agam before the enforcement of th Minister of Home Affairs Regulation?, and (2) How is the appointment and the discharge of village apparatus in Agam after the enforcement of the Minister of Home Affairs Regulation?. This research applies the method of empirical juridical approach. The data collected are the primary data, gained from the party involved in the appointment and the discharge of village apparatus, and the secondary data taken from the primary, secondary and tertiary legal material. It me ns that the researcher finds the fact about the mechanism after the enforcement of the Minister of Home Affairs Regulation. They are (1) in principle, the appointment and the discharge of village apparatus are based on the the Minister of Home Affairs regulation no. 83 of 2015 and local regulation of Agam no. 13 of 2016 which the appointment and the discharge are conducted periodically before the enforcement of the minister of Home Affairs regulation no. 67 of 2917, (2) After the enforcement of the Minister of Home Affairs Regulation no. 67 of 2017, the appointment and the discharge are no longer conducted periodically, however, they are based on age. In this case, if the duty period of the village apparatus is over, he/she will be appointed again until the age of 60. However, there are still some villages in Agam which do not follow the regulation.

Keywords: Appointment, Discharge, Village Apparatus, and Minister ofHome Affairs Regulation.